

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



P-RENJA 2022

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja disusun dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, Agustus 2022
CAMAT RANUYOSO

ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	
III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	
3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	
IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menuju ke arah kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di masa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis ataupun tantangan dan hambatan. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus dapat memberikan suatu pilihan kepada masyarakat. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Kecamatan Ranuyoso tahun 2018-2023 adalah merupakan acuan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022.

a. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Perubahan Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra). Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ranuyoso menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis.

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

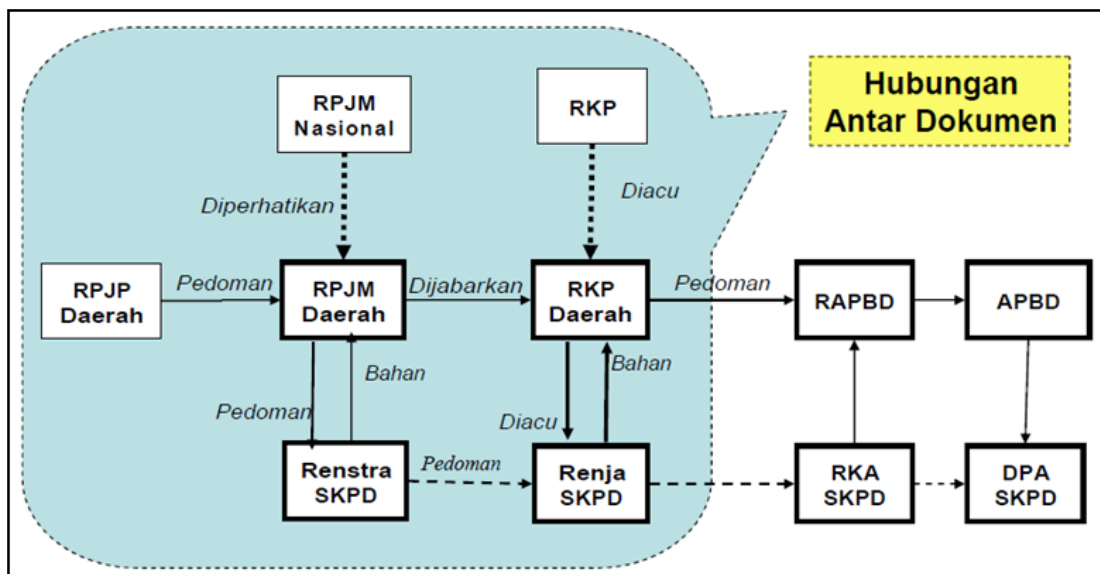
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

b. Proses Penyusunan Perubahan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

c. Keterkaitan Antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan implementasi atas:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Lumajang 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan :

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, maupun pengawasan. Selain itu juga untuk memberikan panduan dasar serta sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai

target yang di harapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai parameter dalam pengukuran capaian kinerja perangkat daerah yaitu :

- a. mewujudkan tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Ranuyoso;
- b. memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergiaan antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Ranuyoso;
- c. dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- d. sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Kantor Kecamatan Ranuyoso diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang:

- Latar Belakang,
- Landasan Hukum,
- Maksud dan Tujuan, serta
- Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Berisi tentang:

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang:

- Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang:

- Uraian Penutup.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Program yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.293.307.861 dengan capaian realisasi 45,69% atau Rp. 720.806.520.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 20.400.000 dengan capaian realisasi 41,67% atau Rp. 8.500.000;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 23.500.000 dengan capaian realisasi 53,19% atau Rp. 12.500.000;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 2.400.000 dengan capaian realisasi 41,67% atau Rp. 1.000.000;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 259.200.000 dengan capaian realisasi 40,28% atau Rp. 104.400.000.

Jika dilihat dari tingkat penyerapannya anggaran untuk Belanja Operasi sampai dengan triwulan II telah mencapai 44,99% atau Rp. 847.206.520 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.883.016.211. Pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II untuk lebih jelasnya terjabarkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Kecamatan Ranuyoso

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%					100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja	100%					100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2 Jenis Dokumen					3 Jenis Dokumen (5 Eksemplar)		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen (20 Eksemplar)		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen					1 Dokumen (6 Eksemplar)		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja	2 jenis							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14 ASN					14 ASN		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 fasilitasi					12 Bulan		
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1Dokumen					0		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen					1 Dokumen (30 Eksemplar)		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%					-		
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai	1 Jenis					-		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%					100		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	3 jenis					4 Jenis		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis					38 Jenis		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis					3 Jenis		
			2 Fasilitasi					30600 Lembar		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	2 fasilitasi					22 Fasilitasi		
			28 fasilitasi					12 Bulan		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%					-		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	1 unit					-		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%					100%		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah fasilitasi jasa surat-menyerurat	1 fasilitasi					12 Bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	4 rekening					4 Rekening		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 jenis					12 Bulan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	7 kendaraa n					8 Kendaraan		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 jenis					4 Jenis		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%					100%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahahan tingkat kecamatan	100%					100%		
7.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 laporan					1 laporan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%					100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%					100%		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang	10 unsur					11 Desa		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	11 fasilitasi					6 Kegiatan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	100%					100%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	100%					100%		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah personil Linmas terbina Trantibum	165 personil					165 personil		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100%					100%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	100%					100%		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas FORKOPIMCAM	3 fasilitasi					12 Bulan		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100%					100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%					100%		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11 desa					11 desa		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ranuyoso dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam P-Renstra Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

TABEL 2.2 T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM Kecamatan	N/A	N/A	77,70	77,90	78,20	78,50	79,17	79,88	77,70	77,90	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	89%	90%	91%	92%	87%	88%	89%	90%	
3	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	N/A	N/A	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	87,8%	87,8%	96,6%	96,6%	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut:

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja; dan
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan

yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB perkapita kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, dan Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso dan Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).

2.3.2 Sinergitas Kebijakan antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya

dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

2) Kesenjangan sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik sosial ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.

4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

5) Penetapan Batas Wilayah

Salah satu konflik wilayah perbatasan yang terjadi dengan Provinsi lain yaitu konflik antara Kabupaten Rembang di Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Konflik ini memperebutkan galian tambang pasir kuarsa. Konflik perbatasan tersebut lebih karena perebutan sumber-sumber daya yang ada di perbatasan untuk menambah penghasilan asli daerah karena pada era otonomi daerah ini memang mengakibatkan setiap daerah berlomba untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

2.3.3. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencangkup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya, dimana, isu strategis terkait dengan masalah.

Tabel 4.1 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasarmasyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Penanganan pandemi COVID-19		
Peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing		
Pengarusatamaan gender belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah Kecamatan Ranuyoso, perumusan isu strategis Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Ranuyoso

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Kurangnya Pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Kurangnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah
Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Petugas Tentang Tertib Administrasi Pelayanan Kecamatan		
Kurangnya Publikasi Terkait Prosedur/Alur Pelayanan Di Kecamatan		
Kurangnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik		

Berdasarkan telaah isu strategis daerah yang berkembang di masyarakat, dirumuskan 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program strategis merupakan implementasi usulan program kepala daerah terpilih. Berikut penjabaran dari 20 Program Strategis Kabupaten Lumajang.

1. Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3

Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, ruma sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada

biaya tambahan obat telah berjalan sampai saat ini. Terdapat 105,1% persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Tahun 2020 dengan 15.565 kelahiran. Program ini merupakan program yang menunjang dalam mencapai Standart Pelayanan Minimum di bidang kesehatan serta peningkatan usia harapan hidup yang merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pemberian persalinan gratis ini ditujukan pada penduduk dengan identitas penduduk Kabupaten Lumajang. Agar program ini tetap berjalan, Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang menunjuk Dinas Kesehatan sebagai pengampu program baik dari segi anggaran sampai strategi kegiatan.

2. Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya

A. Listrik

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat saat ini, karena listrik ini kebutuhan energi yang sangat mendukung pemenuhan peralatan, penerangan dan kebutuhan lain di masyarakat pada masa sekarang. Tujuan program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar yang utama masyarakat berupa jaringan listrik di Kabupaten Lumajang.

Listrik memang bukan kewenangan pemerintah kabupaten Lumajang, sebab ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemenuhan listrik ini merupakan hal yang utama di dalam hidup masyarakat maka pemerintah kabupaten Lumajang memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN (PT PLN) untuk memenuhi kebutuhan ini.

Pemenuhan listrik di dalam program ini ditargetkan bahwa setiap dusun sudah teraliri listrik, sehingga tidak ada lagi dusun yang tidak tersambungkan listrik di Kabupaten Lumajang. Saat ini pemenuhan ini sudah tercapai, sehingga

setiap dusun di Kabupaten Lumajang sudah teraliri listrik dan tidak ada lagi dusun yang tidak tersambungkan listrik.

B. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang utama karena manusia sebagian besar dari tubuhnya adalah air, selain itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) salah satu tujuannya adalah pemenuhan air bersih 100% kepada masyarakat pada tahun 2030 hal ini sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkeinginan untuk melayani pemenuhan kebutuhan air di Kawasan utara dan daerah rawan air yang selama beberapa tahun kemarin masih kesulitan air.

Sasaran program ini adalah di wilayah utara di kecamatan Ranuyoso, Klakah, sebagian Kedungjajang, dan Randuagung, serta Gucialit. Pemenuhan program ini mensinergikan program Pamsimas yang merupakan program pemenuhan air bersih pedesaan dengan program yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Mahameru yakni pemenuhan air perkotaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah yang sangat berperan dalam pencapaian program ini, namun dukungan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah lain juga sangat dibutuhkan.

3. Pemberian Bantuan Seragam Gratis

Pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA telah berjalan, bahkan di tahun 2021 telah terealisasi di Bulan Agustus. Jumlah seragam yang diadakan berdasarkan pengajuan sekolah pagu tahun kemarin yang mana telah terdistribusikan ke sekolah-sekolah. Kemenag selaku lembaga yang menaungi sekolah Madrasah Aliyah (MA) telah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait pengadaan seragam MA, yang mana perjanjian tersebut

tertuang pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/418/427.13/2021. Untuk tingkat SMK/SMA merupakan kewenangan Propinsi dalam pengelolaannya, Kabupaten Lumajang belum memfasilitasi pengadaan seragam karena mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Lumajang. Dalam menjaga keberlanjutan program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menunjuk Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memfasilitasi dan melaksanakan program tersebut.

4. Pemberikan Bantuan Beasiswa untuk Mahasiswa Baru Berprestasi yang Tidak Mampu

Pemberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri juga telah berjalan sampai saat ini. Program ini telah memberikan beasiswa kepada 401 mahasiswa berprestasi. Pemberian beasiswa ini semakin meningkat kuota di tiap tahunnya. Kriteria mahasiswa yang diberikan beasiswa yaitu:

1. mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu dan diterima di perguruan tinggi;
2. mahasiswa baru penghafal Al-Quran (hafiz) minimal 10 juz dan diterima di perguruan tinggi; dan
3. Selain kriteria diatas juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses seleksi;

5. Pemberian Tambahan Tunjangan/Honor bagi Guru Non NIP, Guru Madrasah Diniyah, Guru TPQ, dan Guru Mengaji Masjid/Langgar

Termasuk dalam pelaksanaan pemberian tambahan tunjangan/ honor bagi guru non NIP, guru Madrasah Diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar. Kedua program ini telah berjalan setiap tahun. Sampai Tahun 2021 ini honor guru mengaji telah diberikan kepada sejumlah 6.200 guru mengaji, jumlah tersebut meningkat 200 orang dari tahun 2020, dan 2019 yang kuotanya untuk 6.000 orang guru

mengaji. Pemberian honor guru ngaji dan TPQ berdasarkan data yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) yang diketuai oleh sekretaris camat yang mana proses seleksinya telah berdasar pada SOP yang berlaku. Di tiap lembaga, terdapat 4 orang yang diberikan honor dengan frekuensi pencairan 3 kali dalam setahun. Sedangkan untuk honor guru non NIP dan Madrasah Diniyah tahun 2018 telah diberikan kepada 6.194 guru, tahun 2019 honor diberikan kepada 9.353 guru, dan sampai tahun 2020 telah diberikan kepada 8.944 guru. Berkurangnya kuota honor guru Non NIP tahun 2020 dikarenakan ada guru yang telah diterima PNS, dan ada juga yang mengundurkan diri.

6. Pemberian Tunjangan Uang Duka Kematian

Program pemberian tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000 yang dicairkan tepat waktu dan pemberian bantuan sarana dan prasarana Rukun Kematian setiap tahun telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pemberian santunan kematian bagi penduduk Lumajang adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita pemerintah daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Hingga tahun 2020, total realisasi penyaluran santunan kematian mencapai 10.156 orang. Program ini akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui pengalokasian bantuan kepada masyarakat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PP PA). Bantuan sarana dan prasarana bagi Rukun Kematian ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan bagi perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. Sasaran bantuan adalah semua lembaga rukun kematian yang berdiri dengan seizin desa/kelurahan setempat. Program ini akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang

melalui pengalokasian bantuan kepada masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang.

7. Pengadaan WiFi di Seluruh Sarana Publik dan Di Setiap Desa/ Kelurahan dan juga Pemasangan CCTV

Pengadaan Wifi di seluruh sarana publik secara bertahap direncanakan untuk direalisasikan. Pengadaan wifi selaras dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat.

Pemasangan CCTV sebagai upaya menekan tindak kriminalitas telah terealisasikan sebanyak 485 kamera di desa dan kelurahan yang terkoneksi dengan Dinas Perhubungan. Proses ini masih dilanjutkan secara bertahap untuk dapat menjangkau 198 desa dan 7 kelurahan pada tahun 2022.

8. Rehabilitasi Stadion Semeru

Rehabilitasi Stadion Semeru Lumajang telah dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan stadion kabupaten berstandar nasional. Pada tahun 2021 telah dialokasikan anggaran untuk Rehabilitasi Stadion Semeru sebesar 7 milyar rupiah yang terbagi pada lima rincian pekerjaan meliputi pekerjaan atap tribun sebelah timur, pekerjaan tribun sayap (timur kanan, timur kiri, dan barat kanan), pekerjaan rumah genset, pekerjaan papan score, pekerjaan genset, pekerjaan tiang, dan instalasi lampu sudut. Sedangkan pembangunan stadion berstandar regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun akan dilaksanakan secara bertahap melalui sinergitas pembiayaan dari pemerintah daerah dan dari sektor lain. Diharapkan dengan adanya pembangunan sarana prasarana olahraga banyak manfaat yang didapatkan oleh atlet Lumajang berupa peningkatan potensi dan kemajuan prestasi karena fasilitas olahraga yang semakin baik.

9. Pemberdayaan Karang Taruna, Kelompok Organisasi Pemuda, Lansia, Anak Jalanan, dan Kaum Disabilitas

Pemberdayaan Karang Taruna, kelompok organisasi pemuda, Lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat telah dilaksanakan guna menjamin inklusivitas pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pemberdayaan Karang Taruna ditangani oleh beberapa perangkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan karang taruna melalui upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Dinsos PP PA melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna melalui peningkatan pemberdayaan karang taruna sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Selama tahun 2019-2020 telah dilaksanakan pembentukan karang taruna desa se-Kabupaten Lumajang, dilanjutkan dengan pembinaan dan pelaksanaan bulan bhakti Karang Taruna. Pelaksanaan bulan bakti Karang Taruna yang diikuti Karang Taruna desa se-Kabupaten Lumajang perlu dilanjutkan disertai pengembangan usaha ekonomi produktif Karang Taruna desa untuk memfasilitasi kreativitas generasi muda sesuai dengan bakat dan keahliannya, dan juga mengembangkan cakupan kegiatan Karang Taruna di luar bidang sosial seperti mengadakan liga olahraga Karang Taruna. Selain itu pemberdayaan Karang Taruna juga diarahkan untuk usaha kesejahteraan sosial secara mandiri, advokasi bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan sosial dan hukum. Selain Karang Taruna, Dinsos PP PA juga menangani pemberdayaan lansia, anak jalanan dan kaum disabilitas melalui program-program penanganan PPKS. Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui upaya peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan yang didukung beberapa program.

10. Pengalihfungsian Gedung Soejono menjadi Gedung Kesenian dan Kegiatan Kreatifitas Anak Muda

Gedung Soedjono merupakan aset dari pemerintah daerah

yang dalam beberapa tahun terakhir digunakan sebagai Gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai acara seperti pertemuan, seminar, acara resepsi pernikahan, pameran, bazar dan juga acara-acara kesenian.

Dalam periode pemerintahan ini Gedung ini difokuskan kepada fasilitas untuk kreativitas seni dan anak muda, sehingga Gedung Soedjono kedepannya digunakan hanya untuk acara-acara kesenian dan ajang kreativitas anak muda di Kabupaten Lumajang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata.

11. Melakukan Inisiasi Dan Koordinasi Aktif kepada Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Lumajang sebagai Langkah Mengatasi Problem Kemacetan dan Kemudahan Akses Ekonomi

Kabupaten Lumajang secara geografis terhadap akses mobilitas dan pusat kegiatan nasional maupun regional berada di daerah yang tidak strategis. Hal ini dikarenakan akses masuk dan keluar kabupaten Lumajang yang masih terbatas, masih belum lancar dan belum ada kepastian waktu tempuhnya.

Selain tidak memiliki fasilitas angkutan udara dan angkutan laut, kereta api yang melewati Kabupaten Lumajang hanya berhenti di Klakah, tidak melewati area kota lumajang, dan itupun hanya beberapa saja kereta api yang berhenti di stasiun Klakah. Angkutan Darat lain berupa akses jalan darat terganggu karena belum tersambungannya jalan pantai selatan jawa yang melewati Lumajang, ditambah masih terjadinya kemacetan ataupun antrian di jalan nasional Probolinggo-Lumajang, karena volume kendaraan dan lebar jalan yang masih sempit ditambah adanya gangguan samping berupa pasar tumpah dan jumlah persimpangan yang langsung ke jalan nasional.

Solusi dari permasalahan diatas adalah dengan membangun jalan tol Probolinggo-Lumajang, namun program ini bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Lumajang secara langsung sehingga pemerintah Kabupaten Lumajang hanya bisa

memfasilitasi ke pemerintah pusat agar pembangunan jalan tol ini dapat segera terlaksana.

Program ini sebenarnya sudah terlaksana dengan terbitnya Perpres Nomor 80 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yang salah satunya adalah pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang, sehingga pembangunan sudah masuk dalam program nasional tinggal menunggu waktu untuk proses pembangunannya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

12. Pembangunan Jalan Poros Desa, Menyelesaikan Infrastruktur Jembatan/ Jalan Kabupaten dengan Standart Hotmix, dan Membangun Jalan Penghubung Pasirian- Tempursari

A. Jalan Poros Desa

Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa. Jalan poros desa di program ini adalah jalan poros desa yang merupakan jalan kabupaten sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pembangunan maupun pemeliharannya. Jadi prioritas awal adalah jalan antar desa yang kondisinya rusak, dan yang menghubungkan dua atau lebih desa dan merupakan jalan kabupaten.

B. Jalan Kabupaten Lumajang

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten lumajang yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/89/427.12/2017 tahun 2017 tentang status jalan kabupaten. Jalan-jalan yang ditangani dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi terkait akses di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Adapun jalan- jalan tersebut dengan mempertimbangkan:

1. jalan mendukung kawasan strategis pariwisata nasional;

2. jalan yang menuju pusat kegiatan ekonomi (pertambangan, industri, pertanian, perdagangan); dan
3. jalan strategis yang merupakan percepatan akses dan membuka daerah terisolir.

C. Jalan Pasirian - Tempursari

Jalan Pasirian-Tempursari menjadi program pemerintahan ini dikarenakan sejak tahun 2017 terjadi ombak laut selatan yang besar dan membuat jalur jalan ini terputus sehingga tidak bisa dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini membuat masyarakat dari Pasirian ke Tempursari harus memutar melewati Pronojiwo. Waktu yang bertambah ini membuat beban ekonomi dan mengurangi akses menuju Tempursari.

Program ini dilakukan agar akses orang dari Pasirian ke Tempursari atau sebaliknya bisa terpenuhi. Untuk strategi pemenuhan program ini adalah berupa rintisan trase baru yang bisa membuka kembali jalur baru dari Pasirian Tempursari melewati pantai selatan. Harapannya dengan terbukanya trase baru yang bisa dilewati roda 2 ini akan secara bertahap bisa diselesaikan di beberapa tahun kedepan.

13. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Layak Anak di setiap Kecamatan

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan UU No. 26 tahun 2017 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) terbagi menjadi publik dan privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik antara lain taman kota, taman edukasi, lapangan dan jalur hijau sepanjang jalan,

sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi ekologis antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin;
2. Fungsi sosial budaya antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga;
3. Fungsi Pendidikan : RTH menjadi habitat bagi satwa liar baik menetap maupun tidak maupun peliharaan (satwa yang sengaja dipelihara) untuk menambah nilai edukasi baik langsung maupun tidak langsung;
4. Fungsi ekonomi antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain; dan
5. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menciptakan

suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah); dan
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati)

Ruang terbuka hijau dan taman layak anak di Kabupaten Lumajang menggunakan 1 lokasi yang sama atau berdekatan. Target sasarannya yaitu RTH dan Taman Layak Anak yang direncanakan ada di setiap kecamatan, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab. Pembangunan RTH dan taman layak anak di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro menjadi percontohan pertama di Kabupaten Lumajang. Dengan adanya RTH diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Selain itu, dengan adanya Taman Layak Anak diharapkan meningkatkan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja.

14. Fasilitasi Pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai Langkah Penguatan Ekonomi

Badan Usaha Milik Pesantren (BUMTren) atau yang lebih dikenal dengan istilah BUMP merupakan suatu wadah di lingkup pesantren yang menunjang pengembangan usaha dan kemajuan pesantren di bidang ekonomi. BUMTren mendukung kemandirian pesantren untuk meningkatkan ekonomi dengan melibatkan santri-santri, pengasuh pondok, pengurus, alumni

maupun masyarakat sekitar lingkungan pondok.

Fasilitasi pendirian BUMTren oleh Pemerintah Daerah sangat membantu Pondok Pesantren untuk meningkatkan perekonomiannya. Fasilitasi ini juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi khusus-nya sektor usaha mikro dan pariwisata serta mendukung kemandirian pesantren setelah adanya Covid 19. Fasilitasi pendirian BUMTren melibatkan berbagai sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah atau *stake holder* terkait.

Pondok Pesantren Darun Najah, Kecamatan Summersuko menjadi BUMtren pertama di Kabupaten Lumajang yang telah diresmikan oleh Bupati. Produk yang dihasilkan dan dikembangkan diantaranya kerajinan daur ulang sampah, budidaya ikan, pembibitan pisang, pembuatan aneka olahan ikan dan baju muslim. Semua produk yang dihasilkan melibatkan santri-santri, pengasuh pondok, alumni maupun masyarakat sekitar Ponpes Darun Najah. Ke depannya diharapkan ada BUMtren - BUMtren lainnya yang bermunculan di Kabupaten Lumajang, untuk mendukung peningkatan ekonomi di pesantren.

15. Rehabilitasi Pasar Tradisional yang Lebih Tertata dan Rapi serta Nyaman bagi Para Pedagang Besar dan Pembeli sekaligus Mendirikan Koperasi di Setiap Pasar Tradisional dengan Pinjaman tanpa Bunga

Berdasarkan Permendagri (2007), pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Pasar tradisonal sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan memiliki pola hubungan ekonomi yang menghasilkan terjalinnya interaksi sosial antara pedagang-

pembeli, pedagang-pedagang dan pedagang pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Pasar tradisional tidak hanya memiliki fungsi distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentuk harga, tetapi juga berfungsi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Fasilitas dan bangunan pasar tradisional yang tertata, rapi, dan nyaman memungkinkan pembeli tetap memilih pasar tradisional untuk membeli kebutuhan lauk pauk dan kebutuhan harian lainnya dibandingkan pasar modern. Hal ini tentunya akan mendukung peningkatan nilai PAD dan juga PDRB Kabupaten. Selain itu dengan adanya fasilitasi berupa Koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga akan memudahkan pedagang untuk tetap menjalankan usahanya dengan lancar.

16. Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Pertanian Dengan Memaksimalkan Kerja Sama dan Keterlibatan Masyarakat dengan Jaringan Pelaku Investasi yang Memiliki Daya Tarik Pengembangan Usaha Pariwisata dan Usaha Pertanian

A. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional yaitu sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Potensi wisata merupakan suatu tempat/ objek / sejenisnya yang memiliki nilai estetika, edukasi, sejarah atau sejenisnya sehingga dapat menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung. Dengan

meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah juga akan dapat meningkatkan PAD dan nilai PDRB. Potensi wisata di Kabupaten Lumajang cukup potensial untuk dikembangkan, dengan adanya gunung tertinggi di Pulau Jawa menjadikan Lumajang dianugerahi kekayaan alam yang mumpuni dan cukup potensial untuk dikembangkan seperti Danau Ranu Pane, Ranu Regulo, Ranu Klakah, Air Terjun Tumpak Sewu, Puncak B-29, Gunung Lemongan, Gunung Wayang dan beberapa tempat wisata baru lainnya. Selain itu pengembangan wisata di Kabupaten Lumajang juga didukung oleh Kementrian melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Perhutanan Sosial.

Posisi strategis pengembangan wisata di Kabupaten Lumajang cukup potensial dalam menangkap peluang dan merespon tantangan dinamika pengembangan wisata melalui strategi penguatan kapasitas & kelembagaan di masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan jaringan kerjasama dan investasi daerah. Meningkatkan prinsip edukasi konservasi menjadi bagian paling penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis *community based ecotourism*. Syarat lainnya yang dibutuhkan adalah penguatan kolaborasi dan dukungan antara seluruh pelaku wisata, pemerintah daerah, K/L terkait.

B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional sebagai sumber pangan dan penyumbang devisa. Tidak hanya sebagai sumber pangan dan sumber devisa, sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan bergantung pada sektor ini. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Menurut BPS (2021), mayoritas atau 29,59% lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia ada

di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kata lain, hampir dari sepertiga profesi di Indonesia berkaitan dengan sektor Pertanian. Untuk itu Sektor Pertanian memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia dilihat dari kenaikan PDRB dan PAD daerah.

Sektor pertanian di Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar, dimana Lumajang menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur dengan komoditas andalan padi. Tidak hanya padi produk buah-buahan segar seperti Pisang Agung, Pisang Mas Kirana, Kambing Senduro dan Produk Susu segar, Umbi-Umbian juga menjadi Komoditas Unggulan di Lumajang. Saat ini Lumajang didukung K/L mengembangkan Komoditas Padi Organik; Padi Sehat; dan Padi Biofortifikasi/Nutrizinc (untuk penanganan *stunting*). Selain itu jugaterdapat program Agropolitan dan Perhutanan Sosial yang menjadi fokus tematik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan Perangkat Daerah dan K/L terkait.

17. Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan Sistem Online Tuntas di Kecamatan

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada

layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan lebih awal akan semakin memberikan ruang kepada daerah untuk leluasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi yang secara langsung akan memberikan penguatan kepada pembangunan zona integritas yang sedang dibangun secara berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan layanan adminduk yang diberikan kepada masyarakat, diupayakan perbaikan inovasi-inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara terpadu antara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemutakhiran data kependudukan dalam satu kali layanan dalam waktu yang bersamaan.

2.3.4 Isu Strategis Kecamatan Ranuyoso

Dalam upaya meningkatkan layanan Adminduk yang diberikan kepada masyarakat, diupayakan perbaikan inovasi-inovasi layanan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara terpadu antara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemutakhiran data kependudukan dalam satu kali layanan dalam waktu yang bersamaan.

Analisis upaya peningkatan kualitas pelayanan umum kantor Kecamatan Ranuyoso menggunakan pendekatan SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*), untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal dari potensi Kecamatan Ranuyoso. Peluang dan ancaman yang berkemungkinan di hadapi dalam penembangan potensinya dari faktor eksternal yang digambarkan dalam bagan berikut ini:



Kekuatan (*strenght*) dari pelayanan umum di kantor Kecamatan Ranuyoso salah satunya yaitu solidnya para petugas di pelayanan umum, dibantu oleh kesigapan Forkopimca, dan para perangkat desa dalam hal pemberian pelayanan Adminduk. Kekuatan yang kedua yaitu, tertibnya administrasi di seksi Pelayanan Umum. Pelaksanaan tertib administrasi selain meningkatkan kinerja, juga mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat pengguna layanan yaitu lebih mudah dan singkatnya waktu untuk mengurus dokumen Adminduk.

Kelemahan (*weakness*) yang ada di kantor Kecamatan Ranuyoso yaitu kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, juga pemahaman masyarakat sendiri terhadap tertib administrasi dan prosedur/ alur di Kantor Kecamatan, serta kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Peluang (*opportunity*) Kecamatan Ranuyoso dalam hal memberikan pelayanan publik bagi masyarakat ke depannya yaitu dengan penggunaan teknologi digital. Tingginya pengguna teknologi digital, ditambah lagi dengan pesatnya kemajuan teknologi adalah sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik

digital ini juga sebagian dari konsep e-Government yang secara teoritik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan publik dan dan sektor swasta.

Ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh kantor Kecamatan Ranuyoso dalam memberikan pelayanan publik secara prima selama ini yaitu kurang stabilnya koneksi atau jaringan internet di area Kecamatan Ranuyoso. Selain itu, sering padamnya listrik juga menghambat terselesaikannya dokumen Adminduk tepat waktu.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jamgka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan

terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Sesuai dengan penjelasan terkait dengan 20 Program Startegis Kabupaten Lumajang maka untuk setiap Kecamatan mengemban 1 (satu) program yaitu Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di Kecamatan. Dengan adanya program Adminduk tuntas di kecamatan, kemudahan masyarakat Kecamatan Ranuyoso untuk memiliki dokumen Adminduk dapat tercapai lebih maksimal, dikarenakan dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, diharapkan dapat mengatasi masalah keterbatasan jarak, waktu, tenaga, dan juga biaya untuk mengurus kelengkapan dokumen Adminduk. Dari lengkapnya dokumen Adminduk tiap warga, maka data yang didapatkan oleh pemerintah akan menjadi makin valid. Dengan demikian sasaran pembangunan lebih presisi, sehingga manfaatnya lebih dapat dirasakan masyarakat karena lebih tepat sasaran. Diharapkan dengan tepatnya sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat, dibuktikan dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya ketertiban dan keamanan, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung adanya investor baru yang datang.

Dengan kehidupan ekonomi yang dinamis, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan karena pembangunan ekonomi mulai berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh warga. Ketika pembangunan ekonomi mulai digerakkan dan digalakkan, secara otomatis di berbagai sektor pembangunan juga akan mengalami kemajuan pesat.

Setiap program tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan dari program Admiduk

ini yaitu masih banyak warga yang belum dapat dijangkau oleh pelayanan di kantor Kecamatan Ranuyoso.

Hal tersebut melatarbelakangi lahirnya inovasi “Apukat Ranuyoso” oleh kantor Kecamatan Ranuyoso, yang bertujuan makin mendekatkan pelayanan Adminduk pada warga Kecamatan Ranuyoso, terutama bagi kaum Lansia dan penyandang disabilitas.

Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kantor kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator Adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk. Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan yang sudah ditetapkan lebih awal akan semakin memberikan ruang kepada daerah untuk leluasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi yang secara langsung akan memberikan penguatan kepada pembangunan zona integritas yang sedang dibangun secara berkelanjutan.

Faktor kunci keberhasilan dari inovasi ini adalah sudah terbentuknya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas mengenai pelayanan umum Adminduk yang dapat dilayani oleh kantor Kecamatan Ranuyoso. Kerja sama yang baik antara kantor Kecamatan Ranuyoso dengan para

perangkat desa, dibantu oleh Forkopimca dari unsur TNI dan Polri juga turut mendukung berjalannya inovasi ini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

TABEL 2.5 T-C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Lumajang

Kecamatan Ranuyoso

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ranuyoso	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	1.937.120.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ranuyoso	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	1.577.516.211	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	20.520.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.293.307.861	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2 Jenis Dokumen	4.600.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ranuyoso	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14 ASN	1.293.307.861	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ranuyoso	jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	61.955.150	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ranuyoso	jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	2.420.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	3 jenis	2.710.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja	Kec. Ranuyoso	Evaluasi Kinerja	2 jenis	2.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis	26.454.350	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.562.230.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ranuyoso	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	8.590.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ranuyoso	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	14 ASN	1.540.000.000				2 Fasilitasi		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ranuyoso	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 fasilitasi	17.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi konsultasi SKPD Penyelenggara	2 fasilitasi	24.200.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Ranuyoso	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.700.000			an Rapat Koordinasi SKPD	28 fasilitasi		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.530.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	195.793.200	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	3 jenis	45.600.000	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Ranuyoso	Jumlah Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai	1 Jenis	2.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	150.193.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	76.850.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	26.460.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	3 jenis	2.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ranuyoso	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	7 kendaraan	19.860.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 jenis	30.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 jenis	6.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ranuyoso	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	13.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	20.400.000	
				2 Fasilitasi		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	20.400.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	2 fasilitasi	30.100.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 laporan	20.400.000	
				28 fasilitasi							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	35.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ranuyoso	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	23.500.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ranuyoso	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	1 unit	35.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	23.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	197.920.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ranuyoso	jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang	10 unsur	9.500.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi jasa surat-menyerurat	1 fasilitasi	2.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	11 fasilitasi	14.000.000	
7.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Ranuyoso	jumlah rekening yang dibayar	4 rekening	41.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ranuyoso	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	
7.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	154.320.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	100%	2.400.000	
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	42.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi tugas FORKOPIMCAM	3 fasilitasi	2.400.000	

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Ranuyoso	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	7 kendaraan	32.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ranuyoso	persentase desa tertib administrasi	100%	259.200.000	
7.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ranuyoso	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 jenis	9.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	259.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	38.500.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ranuyoso	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11 desa	259.200.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ranuyoso	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100%	38.500.000						

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02 .2.01.0 2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah laporan koordinasi lintas sektor	1 laporan	38.500.000						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ranuyoso	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	178.300.000						
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	178.300.000						
7.01.03 .2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Ranuyoso	jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang	10 unsur	11.000.000						

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	11 fasilitasi	167.300.000						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Ranuyoso	persentase pemenuhan upaya trantibum	100%	6.600.000						
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	100%	6.600.000						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah personil Linmas terbina Trantibum	165 personil	6.600.000						

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Ranuyoso	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.920.000						
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ranuyoso	Persentase Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.920.000						
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Ranuyoso	jumlah fasilitasi tugas FORKOPIMCAM	3 fasilitasi	7.920.000						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Ranuyoso	persentase desa tertib administrasi	100%	264.200.000						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ranuyoso	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	264.200.000						

KODE	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06 .201.0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Ranuyoso	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11 desa	264.200.000						
	JUMLAH				2.394.140.000					1.883.016.211	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten, usulan program dan kegiatan masyarakat dari desa-desa di Kecamatan Ranuyoso sudah responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian, rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan fisik sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 pada Musrenbang Kecamatan Ranuyoso ini berkonsep *bottom up*, yaitu melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang kecamatan. Pada forum PD ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Ranuyoso. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum PD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.6 T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No.	Kegiatan Prioritas Kecamatan	Lokasi (desa/kel)	Sasaran Kegiatan	Volume	Sub Kegiatan Indikatif	Kegiatan Indikatif	Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			NIHIL					

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Ranuyoso mempunya inovasi yang diberi nama “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput.

2.6.1 Latar Belakang

Latar Belakang dicetuskannya ide Apukat Ranuyoso pada tahun 2019 kemarin adalah berawal dari hasil pengamatan bahwa di Kecamatan Ranuyoso banyak warga penduduknya yang belum memiliki dokumen kependudukan yang *up to date* dikarenakan belum pahamnya warga tentang manfaat dokumen adminduk bagi mereka sebagai salah satu wahana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, keadaan kontur daerah di Ranuyoso yang merupakan daerah perbukitan dengan akses jalan roda 2 yang terbatas karena harus melewati jalan tanah, bahkan melintasi tengah perkebunan yang menyebabkan mahalnya biaya, banyaknya tenaga, dan lamanya waktu untuk datang ke kantor Kecamatan Ranuyoso mengurus dokumen Adminduk.

Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa mengurus Administrasi Kependudukannya lama karena banyak memakan waktu, ruwet, berbelit-belit serta adanya kebiasaan masyarakat yang baru mengurus administrasi kependudukan apabila sudah merasa membutuhkan dan mendesak, bukan karena keharusan dan kesadaran.

Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengatasi kesulitan dan keterbatasan tersebut, kantor Kecamatan Ranuyoso berupaya untuk mendekati diri ke masyarakat, memfasilitasi pelayanan Adminduk Antar Jemput. Untuk tahap awal pelaksanaannya, diberi batasan layanan bagi para Lansia dan kaum disabilitas saja karena keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM.

2.6.2 Tujuan Inovasi

Tujuan dari inovasi ini berangkat dari banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Ranuyoso yang belum memiliki dokumen kependudukan yang *up to date* alias terkini, dengan adanya inovasi ini maka hak-hak masyarakat Kecamatan Ranuyoso akan kepemilikan Administrasi Kependudukan dapat terpenuhi lebih cepat. Tujuan kedua yaitu membantu menyediakan dasar data kependudukan yang valid yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang di tahun-tahun berikutnya.

Adanya inovasi ini juga bertujuan juga untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan dan pengurusan masyarakat dalam Administrasi Kependudukan, terutama kepada kaum Lansia dan Disabilitas. Inovasi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Kecamatan Ranuyoso yang berupaya menjamin hak-hak sebagai warga negara juga dibutuhkan untuk pemutakhiran data kependudukan, dalam rangka tersedianya data kependudukan yang valid, khususnya di wilayah Kecamatan Ranuyoso.

2.6.3 Manfaat

Inovasi ini terkait dengan kategori Adminduk, diharapkan dengan adanya inovasi APUKAT yang dilaksanakan secara optimal akan tercipta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen Adminduk yang *up to date* dan valid. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu dan untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.

Dalam inovasi ini ada kegiatan “Antar” yang diartikan sebagai langkah/tindakan kita mengantar/mengirim ke Desa

atau Dusun output (keluaran) administrasi kependudukan yang masih ada di Kecamatan. Kata “Jemput” diartikan petugas datang ke Desa atau Dusun untuk mengambil berkas atau kelengkapan masyarakat yang akan mengurus Administrasi Kependudukan.

Dengan inovasi ini diharapkan kita lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ranuyoso, pelayanan ini terutama ditujukan bagi warga Lansia dan kaum disabilitas yang mempunyai keterbatasan mobilitas. Patut juga diketahui bahwa kontur daerah Kecamatan Ranuyoso yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan, dimana pemukiman penduduknya tersebar diantaranya. Selain tidak ada transportasi umum, akses jalan ke para warga di Kecamatan Ranuyoso juga sebagian besar masih sulit untuk dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 2.

Pentingnya inisiatif ini dilakukan karena untuk memberikan pengertian dan *edukasi/pendidikan* secara perlahan dan selangkah demi selangkah (*step by step*) kepada masyarakat bahwa Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan yang mendasar, sangat penting dan sebagai data dasar untuk kebutuhan data yang lainnya serta saling terkait karena saat ini pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan baik di pemerintahan maupun di lembaga sudah semakin meningkat.

Manfaat dari aspek ekonomi, yaitu masyarakat makin hemat, dalam artian makin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan, karena tidak harus bolak-balik ke Kecamatan. Selain itu adanya data kependudukan yang valid dapat dijadikan acuan rencana pembangunan, kebutuhan anggaran, dan upaya pencegahan kriminalitas. Manfaat lainnya yaitu aspek lingkungan, dengan makin berkurangnya polusi udara yang ditimbulkan/dihasilkan oleh sarana transportasi yang dikeluarkan/dilakukan masyarakat.

Inovasi ini dapat diterapkan atau diadopsi ke dalam konteks lain atau tempat lain, sepanjang adanya kemauan dari

pelaksana dan memiliki struktur atau kondisi wilayah dan sosial masyarakat yang serupa dengan kondisi di Kecamatan Ranuyoso.

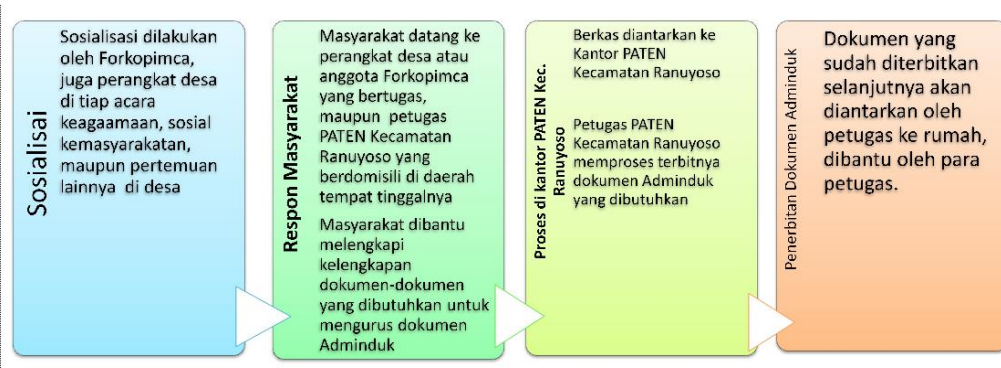
Dalam melaksanakan suatu program/kegiatan pelayanan kepada masyarakat, tentunya diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak agar program/kegiatan tersebut dapat tercapai optimal sesuai yang di harapkan. Untuk merubah suatu perilaku masyarakat, dibutuhkan waktu dan proses serta langkah step by step sesuai tujuan yang di inginkan. Inovasi ini sebagai langkah awal atau dasar untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang lainnya atau berikutnya.

Selama tahun 2021, menurut Laporan hasil pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso, terdata 2.916 pemohon Kartu Keluarga, 915 pemohon akta kelahiran, 514 permohonan akta kematian, 959 perekaman KTP Elektronik, 2.644 pencetakan KTP Elektronik, dan 253 surat keterangan pindah WNI antar kecamatan dalam kabupaten yang dilayani oleh petugas PATEN. Dari sejumlah tersebut, tercatat program ALPUKAT Ranuyoso, sudah melayani 16 pemohon Kartu Keluarga, 54 permohonan akta kematian, dan 58 pemohon penyetakan KTP Elektronik.

2.6.4. Alur Pelaksanaan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam terlaksananya Alpukat Ranuyoso sangat dibutuhkan, yaitu dari Forkopimcadan Kepala Desa beserta jajarannya. Peran dan kontribusinya sangat penting dalam inovasi ini, karena dalam setiap acara/ kegiatan inovasi ini dapat disebarluaskan informasinya kepada masyarakat. Untuk langkah selanjutnya, masyarakat dapat menghubungi para pemangku kepentingan agar bisa meneruskan informasi tentang kesulitannya untuk memenuhi kebutuhannya dalam upaya melengkapi dokumen Adminduknya, dan membantu melengkapi kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya petugas Paten Kecamatan Ranuyoso akan memproses terbitnya dokumen Adminduk yang dibutuhkan. Namun apabila

pelayanan tersebut tidak tersedia atau tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ranuyoso, warga disarankan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Lumajang. Dokumen yang sudah diterbitkan selanjutnya akan diantarkan oleh petugas ke rumah, dibantu oleh para perangkat desa. Uraian di atas, dapat dipahami lebih mudah dalam bagan berikut ini:



Dalam melaksanakan suatu program/ kegiatan pelayanan kepada masyarakat, tentunya diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak agar program/ kegiatan tersebut dapat tercapai optimal sesuai yang di harapkan. Untuk merubah suatu perilaku masyarakat, dibutuhkan waktu dan proses serta langkah *step by step* sesuai tujuan yang di inginkan. Inovasi ini sebagai langkah awal atau dasar untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang lainnya atau berikutnya.

2.6.5. Kendala

Pelaksanaan Apukat Ranuyoso yang seharusnya dapat menjawab permasalahan waktu, biaya, dan tenaga ternyata menghadapi sejumlah kendala. Salah satu diantaranya rusaknya peralatan yang memfasilitasi perekaman e-KTP yang sangat dibutuhkan oleh warga yang sudah rusak dari November 2021 namun sampai sekarang masih belum mendapatkan pengganti dari Disdukcapil Kabupaten Lumajang, hal tersebut tentu saja sangat menghambat jalannya program ini.

Kendala yang kedua adalah keterbatasan speed jaringan internet yang disebabkan Kantor Kecamatan Ranuyoso tidak mempunyai pilihan lain selain memakai provider tunggal internet

tersebut walaupun tarifnya mahal dengan speed yang rendah, yang membuat pelayanan tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai akibatnya, banyak warga yang harus datang keesokan harinya karena menunggu selesainya dokumen.

Masalah kelengkapan berkas dalam mengajukan permohonan dokumen Adminduk juga menjadi kendala. Ada saja masyarakat kurang melengkapi data dan berkas sebagai persyaratan yang diinginkan sehingga pelayanan tidak dapat diberikan. Masih rendahnya pemahaman SDM di kantor Kecamatan Ranuyoso dalam pelaksanaan tertib Adminduk sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Lumajang telah menerbitkan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: Kabupaten Lumajang yaitu: “Terwujudnya masyarakat Lumajang yang bermartabat, makmur dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kecamatan secara keseluruhan adalah: Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar, dan Bersih (*Good and Clean Governance*) yang Berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai oleh Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi

merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut:

1. Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

TABEL 3.1

Tujuan Kecamatan Ranuyoso

Tujuan	Indikator	RUMUS	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan Ranuyoso	Nilai IKM	79,17	79,88	82,50	83	83,20

2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.2

Sasaran Kecamatan Ranuyoso

Sasaran	Indikator	Rumus	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100\%$	87%	88%	91	92	92
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi	(jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)	87,8%	87,8%	90,9	90,9	90,9

	pemerintahan desa tepat waktu	----- X 100% (Jumlah Seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi desa)					
--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--

3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai. Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ranuyosopadatahun Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang dipangku oleh Kecamatan Ranuyoso terdapat 5 (lima) program yang terdiri dari program rutin dan program pencapaian Kinerja bagi para pejabat Kecamatan, jenis program tersebut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- dan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dari program yang di pangku ada beberapa kegiatan yang melekat dalam program, kegiatan itu terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; dan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah:
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

Adapun penjelasan detail mengenai penjabaran program dan kegiatan kantor Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada tabel TC-33 Rumusan sebagaimana berikut:

TABEL 3.3 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang

Kecamatan Ranuyoso

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana					Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran			Kec. Ranuyoso	100%				Kec. Ranuyoso	100%	1.632.420.561	DAU	-359.603.789		1	1.636.193.000
7.01.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			Kec. Ranuyoso	100%							DAU			1	9.500.000
7.01.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan			Kec. Ranuyoso	2 Jenis Dokumen	4.600.000						DAU			3 Dokumen	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022							Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penyusunan Dokumen Renja	1			1.500.000						DAU					
			Penyusunan dokumen perubahan Renja	2			1.500.000						DAU					
			Penyusunan Dokumen Rencana Strategis	3			1.600.000						DAU					
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	Kec. Ranuyoso	1 Dokumen	11.000.000						DAU			1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP	Penyusunan Dokumen LKJiP	1	Kec. Ranuyoso	1 Dokumen	2.420.000						DAU			1 Laporan	2.000.000	
7.01.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja			Kec. Ranuyoso	2 jenis	2.500.000						DAU			2 Laporan	2.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.07																	
			Penyusunan laporan Renja	1			1.500.000						DAU				
			Penyusunan laporan IKM	2			1.000.000						DAU				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kec. Ranuyoso	100%				Kec. Ranuyoso	100%	1.293.307.861	DAU	-268.922.139		100%	1.259.480.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Kec. Ranuyoso	14 ASN	1.540.000.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Kec. Ranuyoso	14 ASN	1.293.307.861	DAU	-268.922.139		14 Orang/ 12 Bulan	1.240.000.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan: honor penanggung jawab pengelola keuangan (bendahara, PA, PPTK, Pengadaan Barjas)	1	Kec. Ranuyoso	4 fasilitasi	17.000.000						DAU			12 Dokumen	15.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.01.202.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD	1	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	2.700.000						DAU			1 Dokumen	2.000.000
7.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Kec. Ranuyo so	1 Dokumen	2.530.000						DAU			1 Laporan	2.000.000
7.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD			Kec. Ranuyo so	100%							DAU				
7.01.01.205.0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	1	Kec. Ranuyo so	1 Jenis	2.500.000						DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5																	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD			Kec. Ranuyoso	100%				Kec. Ranuyoso	100%	96.999.500	DAU	-14.894.850		100%	65.025.000
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	1	Kec. Ranuyoso	3 jenis	2.750.000	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	1	Kec. Ranuyoso	3 jenis	2.710.800	DAU	-39.200		4 Paket	3.000.000
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan			Kec. Ranuyoso	5 jenis	30.800.000			Kec. Ranuyoso	5 jenis	26.454.350	DAU	-4.345.650		38 paket	26.000.000
			Penyediaan ATK	1			26.000.000	Penyediaan ATK	1			26.454.350	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022							Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penyediaan Bahan Pembersih dan alat kebersihan	2			3.000.000						DAU					
			Penyediaan benda pos	3			1.800.000						DAU					
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			Kec. Ranuyoso	3 Jenis	13.200.000			Kec. Ranuyoso	3 Jenis	8.590.000	DAU	-4.610.000		2 Paket	6.000.000	
			penyediaan barang cetakan	1			10.000.000	penyediaan barang cetakan	1			8.590.000	DAU					
			penyediaan penggandaan	2			3.200.000						DAU					
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD			Kec. Ranuyoso	2 fasilitasi	30.100.000			Kec. Ranuyoso	2 fasilitasi	24.200.000	DAU	-5.900.000		1 Laporan	30.025.000	
			rapat koordinasi SKPD	1			15.100.000	rapat koordinasi SKPD	1			20.100.000	DAU					
			perjalanan dinas dalam daerah	2			10.000.000	perjalanan dinas dalam daerah	2			4.100.000	DAU					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022							Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			perjalanan dinas luar daerah	3			5.000.000						DAU					
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD			Kec. Ranuyoso	100%	35.000.000						DAU			100%	34.000.000	
7.01.01.207	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas	1	Kec. Ranuyoso	1 unit	35.000.000						DAU					
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor			Kec. Ranuyoso	100%				Kec. Ranuyoso	100%	195.793.200	DAU	-2.126.800		100%	213.588.000	
7.01.208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah fasilitasi jasa surat menyurat			Kec. Ranuyoso	1 fasilitasi	2.000.000						DAU					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
			Pengadaan Benda Pos	1			2.000.000						DAU				
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar			Kec. Ranuyoso	4 rekening	41.600.000			Kec. Ranuyoso	3 jenis	45.600.000	DAU	4.000.000		12 Laporan	43.200.000
			Pembayaran rekening listrik	1			15.600.000	Pembayaran rekening listrik	1			18.000.000	DAU				
			pembayaran internet	2			24.000.000	pembayaran internet	2			24.000.000	DAU				
			pembayaran air	3			2.000.000	pembayaran air	3			1.200.000	DAU				
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor			Kec. Ranuyoso	2 jenis	154.320.000			Kec. Ranuyoso	2 jenis	150.193.200	DAU	-4.126.800		12 Laporan	170.388.000
			Pembayaran tenaga upah bulanan	1			125.000.000	Pembayaran tenaga upah bulanan	1			122.400.000	DAU				
			pembayaran bpjs kesehatan	2			28.000.000	pembayaran bpjs kesehatan	2			25.080.000	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	3			1.320.000	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	3			2.713.200	DAU				
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD			Kec. Ranuyoso	100%				Kec. Ranuyoso	100%	46.320.000	DAU	-15.640.000		100%	38.390.000
7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara			Kec. Ranuyoso	7 kendaraan	32.600.000			Kec. Ranuyoso	7 kendaraan	19.860.000	DAU	-12.740.000		7 Unit	27.700.000
			Penyediaan BBM	1			16.200.000	Penyediaan BBM	1			13.260.000	DAU				
			Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	2			10.000.000	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	2			4.500.000	DAU				
			Pembayaran Pajak roda 2	3			6.400.000	Pembayaran Pajak roda 2	3			2.100.000	DAU				
7.01.02.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan yang dipelihara			Kec. Ranuyoso	4 jenis	9.500.000			Kec. Ranuyoso	4 jenis	6.600.000	DAU	-2.900.000		10 Unit	7.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pemeliharaan komputer	1			2.000.000	pemeliharaan komputer	1			3.500.000	DAU				
			pemeliharaan laptop	2			3.000.000	pemeliharaan printer	2			1.300.000	DAU				
			pemeliharaan printer	3			1.500.000	pemeliharaan AC	3			1.800.000	DAU				
			pemeliharaan AC	4			3.000.000						DAU				
701020201	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			Kec. Ranuyoso	100%	38.500.000			Kec. Ranuyoso	100%	20.400.000	DAU	-18.100.000		100%	6.000.000
701020201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan			Kec. Ranuyoso	100%	38.500.000			Kec. Ranuyoso	100%	20.400.000	DAU	-18.100.000		100%	6.000.000
701020201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan koordinasi lintas sektor			Kec. Ranuyoso	1 laporan	38.500.000			Kec. Ranuyoso	1 laporan	20.400.000	DAU	-18.100.000		1 Dokumen	6.000.000
			Upah Tenaga Adminduk	1			38.500.000	Upah Tenaga Adminduk	1			20.400.000	DAU				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan			Kec. Ranuyoso	100%	178.300.000			Kec. Ranuyoso	100%	23.500.000	DAU	-154.800.000		100%	153.525.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			Kec. Ranuyoso	100%	178.300.000			Kec. Ranuyoso	100%	23.500.000	DAU	-154.800.000		100%	137.825.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Kec. Ranuyoso	10 unsur	11.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Kec. Ranuyoso	10 unsur	9.500.000	DAU	-1.500.000			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi	Fasilitasi PKK	1	Kec. Ranuyoso	11 fasilitasi	167.300.000	Fasilitasi PKK	1	Kec. Ranuyoso	11 fasilitasi	14.000.000	DAU	-153.300.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022							Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022				Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum			Kec. Ranuyoso	100%	6.600.000						DAU			100%	8.000.000	
7.01.04.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum			Kec. Ranuyoso	100%	6.600.000						DAU			100%	8.000.000	
7.01.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah personil Linmas terbina Trantibum	Pembinaan Personil Linmas	1	Kec. Ranuyoso	165 personil	6.600.000						DAU			1 Laporan	8.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum			Kec. Ranuyoso	100%	7.920.000			Kec. Ranuyoso	100%	2.400.000	DAU	-5.520.000		100%	2.400.000	
7.01.05.20	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum			Kec. Ranuyoso	100%	7.920.000			Kec. Ranuyoso	100%	2.400.000	DAU	-5.520.000		100%	2.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas FORKOPIMCAM	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi wilayah	1	Kec. Ranuyoso	3 fasilitasi	7.920.000	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi wilayah	1	Kec. Ranuyoso	3 fasilitasi	2.400.000	DAU	-5.520.000		1 Dokumen	2.400.000
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi			Kec. Ranuyoso	100%	264.200.000			Kec. Ranuyoso	100%	259.200.000	DAU	-5.000.000		100%	269.100.000
70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Kec. Ranuyoso	100%	264.200.000			Kec. Ranuyoso	100%	259.200.000	DAU	-5.000.000		11 Desa	269.100.000
7010620	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Penyediaan Upah TPD	1	Kec. Ranuyoso	11 desa	264.200.000	Penyediaan Upah TPD	1	Kec. Ranuyoso	11 desa	259.200.000	DAU	-5.000.000		33 Dokumen	269.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022					Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022						Bertambah/Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02																	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Perubahan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sumber referensi untuk pihak pihak lainnya khususnya bagi pihak Kecamatan Ranuyoso.

Ranuyoso, Agustus 2022
Camat Ranuyoso

ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005